

## INDEKS DEMOKRASI EKONOMI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2011

**Awan Santosa**

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi

Universitas Mercu Buana Yogyakarta

### **Abstract**

*This study aims to determine the degree of implementation of economic democracy in Bantul regency in 2011. Measurements were made using the Index of Economic Democracy Indonesia (IDEI) compiled by researchers with expert economic democracy in Indonesia in 2009. Measurement results with the secondary data can be collected indicate that the degree of economic democracy in Bantul regency is at 0.391, which means that Bantul regency implement economic democracy with the proportion of 39.1% in the age of regional autonomy.*

*Keyword: economic democracy, regional autonomy*

### **LATAR BELAKANG**

Konsep demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan sudah lama dipikirkan dan dikembangkan secara khusus oleh pakar ekonomi di dalam maupun di luar negeri dengan berbagai varian pengertian dan ciri-cirinya (Douglas (1920), Carnoy (1980), Dahl (1985), Poole (1987), dan Smith (2000)). Konsep ini bahkan sudah dipikirkan ekonom Indonesia, khususnya M. Hatta, sejak tahun 1930 yang kemudian dirumuskan ke dalam konstitusi (Pasal 33 UUD 1945). Konsep ini terus dikembangkan oleh ekonom-ekonom Indonesia dengan berbagai ragam terminologi (Mubyarto (1980), Swasono (1987), Arief (2000), dan Baswir (2002).

Namun perkembangan pemikiran ke arah demokrasi ekonomi ini tidak diikuti

perkembangan bangunan konsep, teori, dan operasionalisasi demokrasi ekonomi. Sampai saat ini belum ada suatu indikator yang menjadi ukuran penyelenggaraan demokrasi ekonomi baik di dalam maupun luar negeri. Demokrasi ekonomi masih sebatas konsep yang bersifat filosofis, normatif, dan politis. Belum tersedianya model dan alat ukur ini menjadikan agenda-agenda pembangunan daerah yang berbasis demokrasi ekonomi terlalu abstrak dan tidak memiliki arah yang jelas.

Kondisi ini tidak terlepas dari bias konseptual di mana pemahaman publik terhadap demokrasi terdistorsi hanya sebatas demokrasi pada dimensi politik (demokrasi politik). Kondisi yang merupakan fenomena global ini mendorong ketimpangan perkembangan konsepsi

demokrasi di dunia, terutama di negara-negara bekas jajahan seperti halnya Indonesia. Saat ini terdapat setidaknya delapan Indeks Demokrasi Politik yang mengukur kebebasan politik, pemilu, partisipasi rakyat, dan fungsi lembaga negara (Ericsson & Lane, 2002). Baru tataran demokrasi politik inilah yang dikorelasikan dengan indikator sosial-ekonomi seperti pertumbuhan dan pembangunan manusia.

Korelasi tersebut dapat ditemukan pada berbagai model yang dikembangkan berdasar studi empiris di negara-negara tertentu. Model "*Virtuous Trangle*" melihat bahwa pembangunan manusia akan menjadi jalan bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi dan demokrasi yang selanjutnya akan berkorelasi positif satu sama lain (UNSFIR dalam Kuncoro, 2004). Selain itu terdapat model "*Cruel Choice plus Trickle Down*" yang meletakkan pertumbuhan ekonomi sebagai prasyarat munculnya demokrasi dan pembangunan manusia (*ibid*).

Adapun model pertumbuhan endogen dan demokrasi versi Barro melihat posisi pembangunan manusia sebagai variabel paling penting dalam menunjang terjadinya pertumbuhan ekonomi yang akan menjadi prasyarat bagi berkembangnya demokrasi. Model yang agak berbeda dikembangkan oleh Balla, di mana demokrasi justru menjadi pilar kunci bagi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan menghasilkan

perbaikan kualitas pembangunan manusia di suatu negara (*ibid*).

Sementara itu, indikator spesifik yang sudah ada justru tersedia untuk mengukur liberalisasi ekonomi dunia, yaitu *Index of Economic Freedom* (The Heritage Foundation, 1980). Indeks ini mengukur derajat kebebasan ekonomi yang berorientasi pada kemakmuran individual melalui kebebasan dalam bisnis, fiskal, moneter, perdagangan, investasi, keuangan, pemerintahan, korupsi, HAKI, dan kebebasan buruh. Indeks ini sudah menjadi variabel bebas yang dikorelasikan dengan GDP perkapita, pengangguran, dan inflasi.

Berdasar landasan normatif-konseptual dan realitas objektif struktur ekonomi Indonesia kekinian tersebut muncul kebutuhan baik di ranah pengembangan ilmu (teoritis) maupun praktis, untuk memformulasikan model pengukuran derajat demokrasi ekonomi di Indonesia, yang secara khusus dapat diterapkan pada setiap daerah di Indonesia.

Sejalan dengan telah diformulasikannya Indeks Demokrasi Ekonomi Indonesia, maka perlu dilakukan uji coba pengukurannya untuk daerah di Indonesia. Oleh karena itulah penelitian ini menjadi penting sebagai bagian dari uji coba pengukuran Indeks Demokrasi Ekonomi Indonesia di Kabupaten Bantul.

## TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Mengukur Indeks Demokrasi Ekonomi Kabupaten Bantul, Propinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2009/2010
- 2) Memaparkan penerapan Demokrasi Ekonomi di Kabupaten Bantul, Propinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2009/2010
- 3) Memberikan rekomendasi program yang dapat mendorong peningkatan derajat keterapan Demokrasi Ekonomi di Kabupaten Bantul, Propinsi D.I. Yogyakarta.

Penelitian ini bermanfaat sebagai:

- 1) Panduan pengukuran tingkat penerapan demokrasi ekonomi bagi daerah lain di Indonesia, yang kemudian dapat diperbandingkan dengan dan dievaluasi perkembangannya dari tahun ke tahun.
- 2) Temuan variabel baru yang dapat dikorelasikan (menjelaskan) berbagai fenomena ekonomi daerah di Kabupaten Bantul dan daerah lainnya seperti halnya kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, inflasi, pendapatan riil (perkapita),

pertumbuhan, dan variabel makro-ekonomi lain di Indonesia.

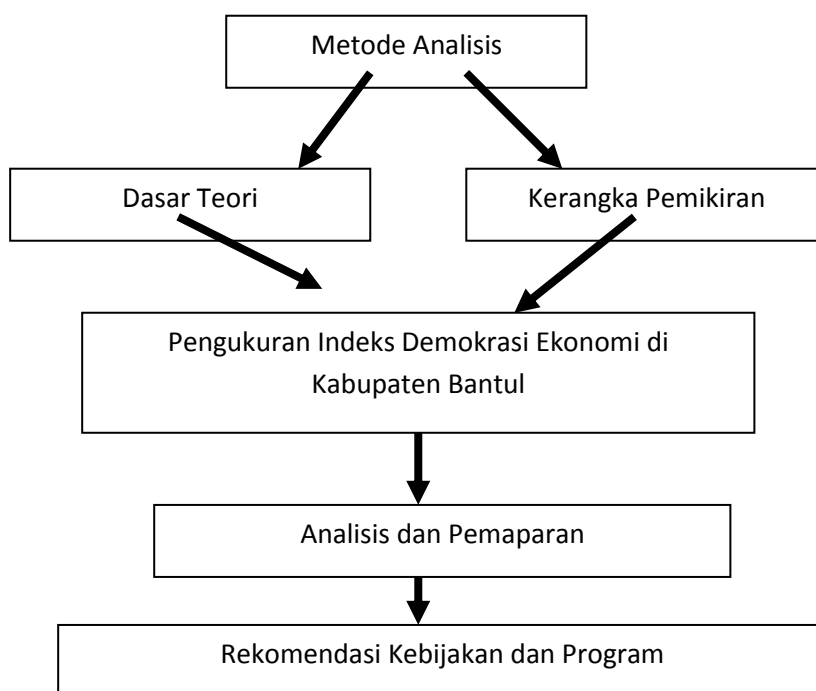
- 3) Sarana mendorong pengarusutamaan aspek pemerataan dan keadilan dalam pembangunan ekonomi selain aspek pertumbuhan dan efisiensi di Kabupaten Bantul dan daerah lain di seluruh Indonesia.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat kuantitatif-deskriptif dengan pendekatan ilmu ekonomi dalam melihat data sekunder berupa pelaksanaan demokrasi ekonomi di Kabupaten Bantul. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi:

- a. Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional, Propinsi, dan Daerah
- b. Publikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul
- c. Publikasi, data. Dan laporan Dinas terkait di Kabupaten Bantul.

Secara ringkas metode dalam penelitian ini dapat ditunjukkan dalam bagan di bawah ini:



Penelitian ini menggunakan alat analisis Indeks Demokrasi Ekonomi (IDE) yang diformulasikan dari penelitian Awan Santosa (2009) bersama 10 ahli demokrasi ekonomi Indonesia dengan metode Delphi. Variabel yang dinilai sesuai oleh para-ahli dan mencapai nilai skor di atas batas minimum persetujuan, sehingga dapat dijadikan sebagai unsur penyusun Indeks Demokrasi Ekonomi Indonesia (IDEI)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis makro ekonomi daerah dilakukan dengan penekanan pada aktivitas ekonomi di sektor riil yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal pemerintah daerah. Analisis ini dilakukan dengan mengukur sejauhmana perekonomian daerah Kabupaten Bantul telah berkembang sejalan dengan yang konsepsi ekonomi

kerakyatan, yang merupakan amanah konstitusi dalam pengelolaan ekonomi, sekaligus basis dan visi pembangunan Kabupaten Bantul

Derajat ekonomi kerakyatan dapat diukur menggunakan alat Indeks Demokrasi Ekonomi (IDE) yang terdiri dari 3 dimensi dan 22 variabel penyusun. Dalam konteks PPU tidak semua variabel dapat diukur menggunakan data statistik (sekunder) yang memang belum tersedia. Oleh karena itu, dalam analisis ini baru dapat diukur 18 variabel yang mewakili pengukuran derajat ekonomi kerakyatan di Kabupaten Bantul. Pengukuran selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 1.

Berdasar pengukuran IDE di atas maka dapat dianalisis lebih mendalam pada tiap-tiap variabel untuk bahan penyusunan strategi dan kebijakan ekonomi daerah yang berorientasi pada keberdayaan dan

kesejahteraan masyarakat Bantul dapat dilihat dalam tabel 2.

**Tabel 1**  
**Analisis Indeks Demokrasi Ekonomi (Ekonomi Kerakyatan)**  
**Kabupaten Bantul Tahun 2011**

No	Variabel Indeks Demokrasi Ekonomi	Nilai Data	Skor
<b>X</b>	<b>Demokrasi Produksi (DP)</b>		
1	Tk. Pengangguran Terbuka	8,95%	0,91
2	Tk. Pengangguran Terselubung		
3	Rasio Upah Buruh/Omzet Perusahaan	32%	0,32
<b>Y</b>	<b>Demokrasi Alokasi (DA)</b>		
1	Porsi Belanja bg Penduduk Miskin	15%	0,15
	Rasio Pendapatan Kelompok 40%	23,29%	0,57
2	Terbawah*		
<b>Z</b>	<b>Demokrasi Penguasaan Faktor Produksi (DPFP)</b>		
Z-a	<i>Faktor Produksi Material</i>		
1	Rasio APBD/PDRB	22,08%	0,22
2	Rasio PAD/APBD	10,3%	0,10
3	Rasio Pembiayaan Domestik/APBD	100%	1
4	Rasio APBD/Total Omzet SDA		
5	Rasio Konsumsi/Kredit Konsumsi		
6	Rasio Investasi Domestik/Total Investasi	84,8%	0,84
7	Rasio Investasi UMKM/PDRB	4,4%	0,04
8	Rasio Kredit/Tabungan	90,13%	0,90
9	Rata2 Luas Kepemilikan Lahan (> 2ha)	20%	0,20
Z-b	<i>Faktor Produksi Intelektual</i>		
10	Rasio Belanja Pendidikan/APBD	15,29%	0,15
11	Rasio Belanja Kesehatan/APBD	6,50%	0,65
12	Rasio Partisipasi Sekolah	59,98%	0,59
Z-c	<i>Faktor Produksi Institusional</i>		
	Rasio Anggota Koperasi/Jumlah Penduduk	20%	0,20
13			
14	Rasio Volume Usaha Koperasi/PDRB	2,5%	0,02
15	Rasio Perusahaan Memiliki SP	19,52%	0,19
16	Rasio Anggota SP/Jumlah Pekerja		
17	Rasio Perusahaan Memiliki ESOP	0%	0
	<b>Jumlah Rata-Rata Skor</b>		<b>0,391</b>

TKah Tangga Miskin/Rumah Tangga Total: Skor total: 7,05

Ket: \* = proxy dengan data proporsi rumah tangga miskin  
tanda kosong berarti data tidak tersedia, nilai skor diambilkan dari nilai positif setiap variabel dengan range antara 0-1, di mana skor terbaik (maksimum) adalah 1.

Tabel 2

**Analisis Variabel dan Implikasi Kebijakan**

No	Variabel (Perhitungan)	Analisis
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (jumlah pencari kerja dibandingkan jumlah angkatan kerja, data BPS)	<ol style="list-style-type: none"> <li>91% masyarakat Bantul sudah terlibat dalam kegiatan perekonomian.</li> <li>Tidak ditemukan data tingkat pengangguran terselubung, yang dalam lingkup Propinsi DIY sebesar 24% dan lingkup nasional sebesar 3x lipat dari pengangguran terbuka (30%)</li> </ol>
2	Rasio upah buruh/omset perusahaan	Data di-proxi melalui data proporsi buruh di Kabupaten Bantul yang sudah diikutsertakan dalam program Jamsostek, yaitu baru sebanyak 32%. baru sekitar 10.985 pekerja dari total 34.331pekerja.
3	Porsi Belanja bg Penduduk Miskin (Nilai belanja penduduk miskin dibandingkan nilai APBD keseluruhan, data APBD 2010)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Alokasi belanja APBD Kabupaten Bantul untuk penduduk miskin sebesar Rp. 25 Milyar atau senilai 2,7% dari total APBD, yang jika dibandingkan dengan proporsi penduduk miskin Bantul sebesar 18%, maka alokasi tersebut menjadi senilai 15%.</li> <li>Penduduk miskin tidak serta merta mampu menyerap program yang tidak bersasaran langsung ke mereka.</li> </ol>
4	Rasio Pendapatan Kelompok 40% Terbawah atau Proporsi Rumah Tangga Miskin (RTM) (jumlah rumah tangga miskin dibandingkan jumlah rumah tangga keseluruhan, data BPS)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Proporsi KK miskin masih cukup tinggi, yaitu 18,05%, yang belum dapat turut menikmati pembangunan Bantul.</li> <li>Kelompok 40% penduduk berpendapatan terendah di Bantul menikmati 23,29%</li> <li>Karakteristik rumah tangga yang miskin tetapi secara ekonomi aktif (produktif).</li> </ol>
5	Rasio APBD/PDRB (Nilai APBD 2010 dibandingkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rasio APBD 2009 yang sebesar Rp. 876 milyar terhadap PDRB sebesar Rp. 3,9</li> </ol>

	nilai PDRB Bantul 2010, data APBD dan PDRB 2010)	trilyun adalah 22,08%.
6	Rasio PAD/APBD (Nilai PAD 2010 dibandingkan nilai APBD 2010, data BPS 2010)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapasitas fiskal pemerintah daerah Kabupaten Bantul hanya sebesar 22,08%</li> <li>2. Rasio PAD yang sebesar Rp. 90,2 milyar terhadap APBD 2009 adalah 10,3%%</li> <li>3. Kewenangan politik anggaran pemerintah daerah adalah sebesar 10,3%, sedangkan 89,7%-nya ditentukan pusat melalui bagi hasil pajak/bukan pajak</li> <li>4. Kondisi ini rawan intervensi dan tekanan dari (oknum) pemerintah pusat</li> </ol>
7	Rasio Pembiayaan Domestik/APBD (Nilai pinjaman daerah dibandingkan nilai APBD 2010, data APBD)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rasio yang 100% menunjukkan pemda Bantul tidak menggunakan obligasi (surat utang) daerah sebagai sumber penerimaan dalam APBD.</li> </ol>
8	Rasio Investasi UMKM/Total Investasi (nilai investasi UMKM dibandingkan nilai investasi total, data BPS 2010)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Investasi UKM yang sebesar Rp. 79 milyar hanya sebesar 4,40% dari total investasi senilai Rp 1,7 T.</li> <li>2. Peran UKM dalam struktur ekonomi Bantul masih sub-ordinan (marjinal) karena tidak <i>linkage</i> dengan usaha di sektor primer (pertambangan).</li> </ol>
9	Rasio Kredit/Tabungan (nilai pinjaman dari perbankan di Bantul dibandingkan dengan nilai simpanan/tabungan pihak ketiga, data PPD)	<p>Rasio kredit 2010 sebesar Rp. 868 milyar terhadap dana pihak ketiga sebesar Rp. 963 milyar sudah sebesar 90,03%.</p> <p>Sumber keuangan daerah Bantul sudah dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha di Bantul., walaupun perlu dipetakan struktur pengusaha pengakses kredit bank umum tersebut.</p>
10	Rata-rata luas kepemilikan lahan (> 2 ha) (jumlah penduduk yang memiliki lahan di atas 2 ha dibandingkan dengan jumlah penduduk keseluruhan,)	Rata-rata luas kepemilikan lahan petani di Bantul hanya 400m, sehingga di bandingkan dengan rata-rata ideal yang sebesar 2 ha maka luasan tersebut baru mencakup 20%-nya saja.

11	Rasio Pendidikan/APBD (nilai belanja modal dinas pendidikan dibandingkan nilai APBD 2010 keseluruhan, data APBD 2010)	Belanja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rasio belanja modal bidang pendidikan sebesar Rp. 134 milyar terhadap APBD 2010 adalah 15,29%, yang merupakan realisasi APBD 2010.</li> <li>2. Dana-dana pendidikan belum dikelola optimal.</li> <li>3. Secara keseluruhan rasio belanja modal (publik) terhadap APBD adalah sebesar 34%.</li> </ol>
12	Rasio Kesehatan/APBD (Nilai belanja barang dan jasa dan modal dinas kesehatan dan RSUD dibandingkan nilai APBD keseluruhan 2010, data APBD 2010)	Belanja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rasio belanja kesehatan yang sebesar Rp. 56,94 milyar terhadap APBD 2010 adalah 6,50%.</li> <li>2. Alokasi anggaran kesehatan masih belum memadai. Di mana masih banyak RTM,3terdapat kasus gizi buruk4 dan pencemaran lingku5gan.</li> </ol>
13	Rasio partisipasi sekolah (jumlah anak usia SMA yang sekolah/jumlah anak usia SMA keseluruhan tahun 2010)		Angka partisipasi murni SMA di Kabupaten bantul sebesar 59,98%, yang berarti masih sebanyak 41% anak usia SMA yang tidak melanjutkan pendidikan sampai jenjang SMA.
14	Rasio Koperasi/Jumlah Penduduk (jumlah anggota koperasi aktif dibandingkan jumlah penduduk keseluruhan Bantul, data BPS 2010)	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah anggota koperasi sebanyak 180.814 orang baru 20% dari total penduduk sebanyak 900.000 orang.</li> <li>2. Peran koperasi baik secara kualitas maupun kuantitas masih sangat terbatas, dengan posisi sub-ordinan (marjinal) dalam struktur perekonomian daerah.</li> </ol>
15	Rasio Volume Koperasi/PDRB (nilai omset usaha yang ditaksir berdasarkan nilai aset koperasi dibandingkan nilai PDRB keseluruhan, data BPS dan PDRB 2010)	Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Volume usaha (omset) koperasi yang diperkirakan sebesar Rp. 184 milyat adalah 4.89% dari PDRB, yang makin menguatkan bahwa koperasi belum berperan utama dalam perekonomian.</li> <li>2. Transaksi ekonomi lebih banyak dilakukan dengan perusahaan swasta (perorangan)</li> </ol>
16	Rasio Perusahaannya memiliki serikat pekerja	Perusahaan	Perusahaan di Bantul total berjumlah sebanyak 566, di mana 292 di antaranya sudah menjadi



(jumlah perusahaan peserta jamsostek, namun baru 57 di antaranya memiliki serikat yang memiliki serikat pekerja (19,52%).  
pekerja/jumlah Kondisi ini menunjukkan lemahnya peran buruh di perusahaan memiliki skim hadapan pengusaha/pemodal, yang secara jamsostek) “sistematis” didukung oleh pemerintah dengan sedikitnya aparat pengawas/penegak hukum.

- 17 Rasio Perusahaan 1. Belum ditemukan perusahaan yang Memiliki ESOP (jumlah menerapkan pola kepemilikan saham oleh perusahaan yang karyawan (*employee share ownership plan/ESOP*) menerapkan pola ESOP dibandingkan jumlah perusahaan keseluruhan, data BPS tahun 2010 dan survey Pustek 2009-2010)

## KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil perhitungan terhadap 18 variabel Indeks Demokrasi Ekonomi Kabupaten Bantul adalah sebesar 0,391, yang berarti derajat penerapan demokrasi ekonomi (ekonomi kerakyatan) di Kabupaten Bantul adalah sebesar 39,1%

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Demokrasi Ekonomi di kabupaten Bantul tersebut maka disampaikan saran (rekomendasi) berbagai kebijakan dan program yang perlu mendapat penekanan sebagai berikut:

1. Perhatian pada kelayakan upah, kerja, keberdayaan pekerja, dan produktivitas.
2. Perlindungan tenaga kerja bantul melalui dorongan pengikutsertaan buruh dalam program Jamsostek

3. Disain program/terobosan lokal untuk fokus pada sasaran penduduk miskin (15-16%)
4. Aplikasi *pro-poor budgeting* dengan rasio alokasi APBD minimal separuh dari tingkat kemiskinan (8-9%)
5. Alokasi untuk jaminan sosial, permodalan (material, intelektual, dan institusional) bagi penduduk miskin Bantul.
6. Disain role model Kredit Rumah Tangga Miskin Produktif, dengan referensi Grameen Bank, Bangladesh.
7. *Technical assistance* khusus bagi lembaga (usaha) produksi, keuangan, dan pemasaran KK miskin
8. Sinkronisasi peran ekonomi pemerintah daerah dengan ekonomi rakyat Bantul, melalui kemitraan produksi, keuangan, dan pemasaran

9. Disan kebijakan yang langsung berdampak pada sektor rill seperti penguatan kelembagaan dan kapasitas ekonomi rakyat.
10. Revitalisasi peran BUMD dan BUMDes dalam mengelola sektor primer (SDA) penyumbang APBD terbesar
11. Mempertimbangkan *tax and revenue sharing*, di mana pemungutan pajak bernilai besar sebagian menjadi kewenangan pemerintah daerah.
12. Harus selalu dihindari pembiayaan APBD menggunakan sumber dari luar negeri/swasta (obligasi daerah)
13. Role model dan pengembangan *linkage* UKM dengan industri primer (pertambangan).
14. Linkage UKM dengan belanja pemerintah daerah, semisal dengan prioritas belanja APBD ke UKM lokal.
15. Perlu kajian struktur pengakses dana-dana perbankan, agar tidak terkonsentrasi pada pelaku usaha lapis atas saja.
16. Kemitraan antara lembaga keuangan formal dan organisasi ekonomi rakyat (tani, ternak, dan nelayan) dengan penjaminan/fasilitasi pemerintah daerah
17. Reforma agraria (redistribusi lahan) bagi petani penggarap Bantul sehingga dapat lebih mengoptimalkan lahan-lahan tidur dan kritis yang ada
18. Dinas perlu membuat terobosan untuk optimalisasi sumber daya pendidikan, semisal kemitraan dengan dinas peternakan, lingkungan hidup, perindagkop untuk tujuan pembelajaran dan layanan bagi siswa.
19. Belanja modal pendidikan idealnya 20% dari total APBD.
20. Belanja kesehatan idealnya minimal 10% dari APBD untuk layanan preventif dan peningkatan kualitas SDM, termasuk jaminan kesehatan menyeluruh (sesuai UU Kesehatan).
21. Perlu dirilis program pendidikan gratis tingkat SMA untuk siswa dari keluarga tidak mampu, di sertai dukungan anggaran dan penyadaran pentingnya pendidikan bagi warga masyarakat kurang mampu di Kabupaten Bantul
22. Mobilisasi kesadaran berkoperasi dan sosialisasi manfaat sosial-ekonomi berkoperasi secara luas, dengan berbagai media.
23. Kemitraan disperindagkop, koperasi rakyat, dan sekolah untuk perluasan basis keanggotaan, layanan, dan usaha koperasi
24. Kemitraan koperasi rakyat dengan pemerintah daerah (SK Bupati) dalam pembelian barang/jasa dari koperasi.
25. Role model kemitraan koperasi dalam mata rantai usaha sektor primer pertambangan, dengan BUMN atau BUMD.

26. Disain outlet pasar sentra koperasi daerah
27. Role model dan pengembangan koperasi produksi dan koperasi pemasaran rakyat yang dapat diunggulkan daerah
28. Perluasan partisipasi buruh dalam organisasi (perusahaan) melalui fasilitasi pembentukan serikat pekerja (karyawan) baik di tingkat perusahaan maupun tingkat wilayah.
29. Mulai penyadaran hak-hak pekerja, termasuk dalam kontribusi dan kepemilikannya terhadap perusahaan.

oleh Akhmad Setiawan, Jakarta, Yayasan Obor.

Devune, Pat, 1995, *Demokrasi dan Perencanaan Ekonomi*, Yogyakarta, Tiara Wacana

Hines, Collins, 2005, *Mengganti Globalisasi Ekonomi Menjadi Lokalisasi Demokrasi*, Insist Press, Yogyakarta

Kuncoro, Mudrajad, 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Erlangga, Jakarta

Kekic, Laza, 2007, *The Economist Intelligence Unit's Index of Democracy*, EIU Report 2007

Kriegman, Orion, 1998, *The Potential for Economic Democracy n America*

Levinson, J. M. (2005). To gain consensus on a definition of multicultural children's literature: A Delphi study. *Digital Abstracts International*, 66 (08), 2869. (UMI No. 3184291).

Linstone, A & Murray T, 1974, *The Delphi Method: Tecnique and Application*, Reading: Addison-Wesley

Mubyarto, 1997, *Ekonomi Rakyat, Program IDT, dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*, Aditya Media, Yogyakarta

Mubyarto, Capres/Cawapres dan Ekonomi Rakyat, dalam *Jurnal Ekonomi Rakyat*, Bogor, Yayasan Agro Ekonomika (YAE).

## DAFTAR PUSTAKA

Archer, Robin, *Economic Democracy: The Politics of Feasible Socialism*, Clarendon Press

Arief, Sritua, 2006, *Negeri Terjajah*, Yogyakarta, Resist Book

Bappeda Kabupaten Banyul, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah b(RPJMD) Kabupaten Bantul 2011-2015

BPS Kabupaten Bantul, Bantul Dalam Angka 2010

Forum Rektor Indonesia, 2007, *Sistem Ekonomi yang Berkeadilan Sosial*, (naskah akademik), Makassar, FRI.

Dahl, Robert A, 1985, *Demokrasi Ekonomi: Sebuah Pengantar*, diterjemahkan

- Mutis, Thoby, 2002, *Cakrawala Demokrasi Ekonomi*, Tiara Wacana, Yogyakarta
- Nambisan, S., Agarwal, R., & Tanniru, M. (1999). Organisational mechanisms for enhancing user innovation in information technology. *MIS Quarterly*, 23(8), 365 - 395.
- Poole, Michael, 1987, *The Origin of Economic Democracy*, Routledge, London
- Pusat Pendidikan dan Studi Kebansentralan, 2002, *Daya Saing Daerah: Konsep dan Pengukurannya di Indonesia*, BI, Jakarta
- Rachbini, Didik J, 2001, *Politik Ekonomi Baru Menuju Demokrasi Ekonomi*, Grasindo, Jakarta
- Ringen, Stein, 2004, *A Distributional Theory of Economic Democracy*, Routledge
- Rodgers, B. L. & Cowles, K. V. (1993). The qualitative research audit trail: A complex collection of documentation. *Research in Nursing and Health*, 16, 219 - 226.
- Smith, J.W., 2000, *Economic Democracy: Political Struggle in Twenty-first Centuries*, New York, M.E. Sharpe.
- Svante, Erricson & Jan-Eric Lane, 2002, *Demokratisasi Pertumbuhan*, RajaGarfindo, Jakarta
- Swasono, Sri Edi, 1987, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, UI Press, Jakarta
- Situmorang, Johny W dkk, *Prototipe Model Pemeringkatan Koperasi Berdasarkan MDP*, dalam Infokop No 28 Tahun XXII, 2006
- The Heritage Foundation, *Index of Economic Freedom 2007*
- Wikipedia, 2007, *Economic Democracy*, diakses di internet tanggal 12/8/2007
- Williams, 2002, Bologna and Emilia Romagna: A Model of Economic Democracy, diakses di internet tanggal 12/8/07 jam 09.49 WIB.

## PEDOMAN PENULISAN NASKAH

Naskah yang diterima merupakan hasil penelitian, naskah ditulis dalam bahasa Indonesia, diketik dengan computer program MS. Word, front Arial size 11. Jarak antar baris 2 spasi maksimal 15 halaman termasuk garfik, gambar dan tabel. Naskah diserahkan dalam bentuk print-out dan CD; dibuat dengan jarak tepi cukup untuk koreksi.

Gambar (gambar garis maupun foto) dan tabel diberi nomor urut sesuai dengan letaknya. Masing-masing diberi keterangan singkat dengan nomor urut dan dituliskan diluar bidang gambar yang akan dicetak.

Nama ilmiah dicetak miring atau diberi garis bawah. Rumus persamaan ilmu pasti, simbol dan lambang semiotik ditulis dengan jelas.

Susunan urutan naskah ditulis sebagai berikut :

1. Judul dalam bahasa Indonesia.
2. Nama penulis tanpa gelar diikuti alamat instansi.
3. Abstract dalam bahasa Inggris, tidak lebih 250 kata.
4. Materi dan Metode.
5. Hasil dan Pembahasan.
6. Kesimpulan.
7. Ucapan terima kasih kalau ada.
8. Daftar pustaka ditulis menggunakan sistem nama, tahun dan disusun secara abjad

Beberapa contoh :

### Buku :

Mayer, A.M. and A.P. Mayber. 1989. *The Germination of Seeds*. Pergamon Press. 270 p.

### Artikel dalam buku :

Abdulbaki, A.A. And J.D. Anderson. 1972. Physiological and Biochemical Deteration of Seeds. P. 283-309. In. T.T.Kozlowski (Ed) *Seed Biology* Vol. 3. Acad. Press. New York.

### Artikel dalam majalah atau jurnal :

Harrison, S.K., C.S. Williams, and L.M. Wax. 1985. *Interference and Control of Giant Foxtail (Setaria faberi, Herrm) in Soybean (Glicine max)*. *Weed Science* 33: 203-208.

### Prosiding :

Kobayasshi, J. Genetic engineering of Insect Viruses: Recobinant baculoviruses. P. 37-39. in: Triharso, S. Somowiyarjo, K.H. Nitimulyo, and B. Sarjono (eds.), *Biotechnology for Agricultural Viruses*. Mada University Press. Yogyakarta.

Redaksi berhak menyusun naskah agar sesuai dengan peraturan pemuatan naskah atau mengembalikannya untuk diperbaiki, atau menolak naskah yang bersangkutan.

Naskah yang dimuat dikenakan biaya percetakan sebesar Rp 100.000,- dan penulis menerima 1 eks hasil cetakan